BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jika dilihat pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup besar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,49%. Berdasarkan sensus penduduk dunia pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-4 dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Kompas.com). Sedangkan dari segi luas wilayah, Indonesia berada pada urutan ke-15 negara terluas di dunia menurut *Worldmaters*. Namun, jumlah penduduk yang sangat banyak ini tidak diimbangi dengan pesebaran penduduk yang merata, sebagian besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk di Indonesia berjumlah 137 jiwa/km^2. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Indonesia berjumlah 139 jiwa/km^2. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat menjadi 140 jiwa/km^2. (bps.go.id)

Kepadatan penduduk terbesar tersebar di Pulau Jawa. Selain itu, kepadatan penduduk tinggi berada di wilayah kota. Kota merupakan pusat dari berbagai jenis kegiatan, seperti pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat dari sosial budaya. Kota mempunyai daya tarik tersendiri sehingga masyarakat dari desa banyak yang melakukan urbanisasi ke kota. Masyarakat menganggap kota memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti, banyaknya jumlah lapangan

kerja, pusat lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pusat hiburan. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota sehingga memunculkan terjadinya urbanisasi.

Pertumbuhan masyarakat kota akibat tingginya angka urbanisasi berimbas pada peningkatan jumlah penduduk di kota dan tentu saja berdampak ke segala aspek. Jika dilihat dari aspek lapangan kerja maka ketersediaan lapangan kerja terbatas dan persaingan di dunia kerja akan semakin tinggi pula. Selain itu, jika dilihat dari ketersediaan lahannya, wilayah perkotaan memiliki lahan yang terbatas karena penggunaan lahannya digunakan untuk aktifitas ekonomi, pemerintahan dan lain-lain, hal ini berakibat pada munculnya permukiman-permukiman kumuh yang disebabkan oleh kurangnya lahan permukiman dan juga keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh kaum urban.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat urbanisasi cukup tinggi adalah Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang menjadi salah satu kota tujuan kaum urban di Provinsi Kepulauan Riau selain Kota Batam. Kota Tanjungpinang sendiri terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat. Sedangkan sebaran penduduk di Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2021

Kecamatan	**Jumlah Penduduk (Jiwa)**		
	2019	**2020**	**2021**
Bukit Bestari	56.605	54.410	54.599
Tanjungpinang Timur	92.270	109.780	114.875
Tanjungpinang Kota	20.349	19.226	19.512
Tanjungpinang Barat	48.171	44.247	44.381
Kota Tanjungpinang	219.395	227.663	233.367

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Dari data di atas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk pada tahun 2019-2020 sebesar 3,8% sedangkan pada tahun 2020-2021 sebesar 2,5%. Berdasarkan data terebut juga dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang terjadi penurunan. Salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan sebagian meninggalkan Kota Tanjungpinang.

Meskipun demikian, Kota Tanjungpinang tetap menjadi tujuan masyarakat untuk berbagai aktifitas mulai dari ekonomi hingga Pendidikan. Selain itu, kondisi Kota Tanjungpinang yang merupakan daerah pesisir menyebabkan beberapa wilayahnya terdapat permukiman kumuh.

Menurut Titisari dan Farid Kurniawan (dalam Adon, 2015: 337) *"menjelaskan aspek permukiman kumuh sebagai berikut. Pertama, kondisi bangunan atau rumah; Kedua, ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan, kerentanan status penduduk; Ketiga, berdasarkan aspek pendukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas*

yang dibangun secara bersama swadaya atau pun nonswadaya oleh masyarakat".

Menurut Khomarudin (dalam Adon, 2015: 339) menjelaskan bahwa

"lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha); kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah; jumlah rumahnya sangat padat dan dibawah standar; sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan, hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain dan diatur perundang-undangan yang berlaku".

Tabel 1.2 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang

No.	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Pantai Impian, Kelurahan Kampung Baru	12,6
2.	Lembah Purnama, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	5,99
3.	Sungai Nibung Angus, Kelurahan Tanjungpinang Timur	14,6
4.	Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjung Unggat	31,64
5.	Pelantar Sulawesi, Kelurahan Tanjungpinang Kota	51,85
6.	Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis	18,92
7.	Senggarang, Kelurahan Senggarang	14,81
	Total	150,41

Sumber: SK Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan data di atas, kawasan kumuh didominasi oleh wilayah-wilayah pesisir karena pada kawasan pesisir kondisi kumuh bukan hanya terjadi akibat dari ulah manusia tetapi juga oleh faktor alam. Faktor alam terjadi ketika air laut pasang, sampah yang berasal dari daerah lain akan hanyut terbawa dan ketika air laut surut sampah tersebut akan tertinggal/tersangkut di tempat yang dilaluinya.

Salah satu tempat kumuh atau slum area di Kota Tanjungpinang adalah Kampung Bugis. Kampung Bugis terletak di Kelurahan Kampung Bugis,

Kecamatan Tanjungpinang Kota, yang letaknya di tepi laut yang berbatasan langsung dengan pusat kota.

Dalam catatan sejarah, pascaperseteruan Raja Sulaiman dengan Raja Kecil dari Siak pada tahun 1718, banyak orang dari Sulawesi Selatan (Bugis/Luwu) yang datang ke tanah Melayu. Orang-orang Melayu menganggap para pendatang ini sebagai saudara karena telah berjasa membantu mereka mengalahkan Raja Kecil dari Siak. Sebagai rasa terima kasih orang-orang Melayu kepada orang Bugis yang telah membantunya, maka mereka kemudian memberikan tempat untuk ditinggali. Dari masa ke masa orang-orang Bugis pun semakin banyak yang berdatangan dan tempat tersebut lambat laun berkembang menjadi sebuah perkampungan. Suku Bugis/Luwu ini sangat cepat berasimilasi serta berbaur dengan orang-orang Melayu.

Kampung Bugis memiliki luas wilayah ± 2.500 Ha yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tangga (RT), serta memiliki jumlah penduduk yaitu 10.437 Jiwa dan 3047 KK (Sumber: Monografi Kelurahan Kampung Bugis 2018). Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Kampung Bugis adalah sebagai nelayan. Masyarakat yang mendiami Kampung Bugis bukan hanya berasal dari Suku Bugis, namun juga berasal dari berbagai suku bangsa lainnya seperti Suku Melayu, Suku Banjar, dan Suku Jawa. Interaksi masyarakat dari berbagai suku tersebutlah yang menghasilkan tingkah laku Masyarakat Kampung Bugis.

Sebagian besar sampah yang ada di Kampung Bugis berasal dari sampah kiriman ketika air laut pasang. Sedangkan di daratnya tempat pembuangan sampah hanya berada di satu titik lokasi yaitu dekat dengan Kantor Kecamatan yang letaknya cukup jauh dari permukiman masyarakat. Namun sampah tersebut dibiarkan begitu saja oleh masyarakat. Sehingga upaya gotong royong untuk membersihkan sampah baik sampah yang berasal dari masyarakat atau pun sampah kiriman dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan, dan juga dilakukan saat ada pelaksanaan gotong royong bersama dengan pemerintah terkait.

Kondisi ini menyebabkan banyaknya sampah di kampung tersebut karena adanya pasang surut air laut yang membawa sampah sampai ke daerah tersebut. Selain itu, kondisi perumahan yang berada di atas laut membuat hal demikian terjadi dimana sampah dari kawasan luar/ daerah lain akan tersangkut di kolong-kolong rumah masyarakat dan juga tempat pembuangan sampah yang letaknya cukup jauh dari permukiman masyarakat sehingga masyarakat banyak yang memilih untuk membuang sampah ke laut. Masyarakat masih menganggap laut merupakan tong sampah besar sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan di laut karena merasa arus laut akan menghanyutkan sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat dan juga permasalahan sampah ini diperparah oleh kepadatan penduduk di Kampung Bugis. Menurut data monografi Kampung Bugis, penduduk di Kampung Bugis yang berjumlah 10.437 jiwa, kepadatan penduduk yang ada di Kampung Bugis tentu saja mempengaruhi kondisi lingkungan fisik maupun non fisik.

Kondisi Permukiman kumuh yang tentu saja berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan kumuhnya lingkungan tempat tinggal tanpa masyarakat sadari banyak penyakit yang dapat menyebar dan mengganggu kesehatan masyarakat karena limbah sampah yang menggunung dan menumpuk di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat tentu mengandung berbagai bakteri dan virus menyebab penyakit. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, terdapat 10 penyakit teratas di Kelurahan Kampung Bugis sebagai berikut.

Tabel 1.1 10 Penyakit teratas di Kelurahan Kampung Bugis

No.	Nama Penyakit	Jumlah
1.	Hipertensi	3.236
2.	Infeksi Pernafasan Atas	2.922
3.	Kelainan Pada Jaringan Otot	2.290
4.	Dan Lain-lain	1.793
5.	Infeksi Pada Kulit	1.433
6.	Penyakit Lainnya	959
7.	Gastritis	896
8.	DM	837
9.	Penyakit Pada Gester	759
10.	Infeksi Pada Jaringan Pulpa	614

Sumber: Data SP2TP Puskesmas Kampung Bugis Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyakit yang diderita oleh masyarakat berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan masyarakat, seperti infeksi pernafasan atas dan infeksi pada kulit, penyakit tersebut berasal dari kurang terjaganya kualitas udara dan lingkungan sekitar. Sehingga berdasarkan SK Permukiman Kumuh dan Indikator Kumuh tersebut Kampung Bugis menjadi kelurahan sasaran pengentasan kekumuhan di Kota Tanjungpinang.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil upaya untuk mengurangi angka permukiman kumuh yang ada di Kampung Bugis dengan menjalankan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program Kotaku merupakan istilah pengganti yang digunakan pemerintah saat ini untuk istilah PNPM MP pada pemerintah sebelumnya. Program ini merupakan kelanjutan dari program PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang dahulunya bernama P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). Bentuk program Kotaku yang telah dilaksanakan di Kampung Bugis adalah pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPALD-T) skala permukiman, pembangunan jembatan lingkar, pengecatan rumah-rumah warga, dan bak sampah keliling.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Program KOTAKU ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh 34 provinsi. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh

dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. (http://kotaku.pu.go.id/).

Berdasarkan SK Walikota tentang permukiman kumuh tahun 2014, Kota Tanjungpinang ternyata memiliki permukiman kumuh yang tersebar di beberapa titik lokasi yaitu, Kampung Bugis, Pantai Impian, Lembah Purnama, Sungai Nibung Angus, Kelurahan Tanjung Unggat, Pelantar Sulawesi, dan Senggarang. Titik permukiman kumuh terluas terletak di Pelantar Sulawesi, Kelurahan Tanjungpinang Kota dengan luas 51,85 Ha. Total luas keseluruhan 150,41 Ha.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) yang tertuang di Kotaku.go.id

Indikator permasalahan infrastruktur pemukiman sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung
   - Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk;
   - kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
   - ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
   - Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
   - Lebar jalan yang tidak memadai;
   - Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3. Penyediaan Air Minum
   - Ketidaktersediaan akses air minum;
   - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
   - Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
4. Drainase Lingkungan
   - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
   - Menimbulkan bau;
   - Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
5. Pengelolaan Air Limbah
   - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
   - Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
   - Tercemarnya lingkungan sekitar.
6. Pengelolaan Persampahan
   - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
   - Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
   - Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
7. Pengamanan Kebakaran
   - Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
   - Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
   - Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
8. Ruang Terbuka Publik
   - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
   - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP).

Bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun maksud yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah berkaitan dengan perbaikan akses sarana dan prasarana infrastruktur serta perbaikan fasilitas pelayanan umum, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah.

Tabel 1.4 Indikator-Indikator Beserta Parameter Program KOTAKU di Kelurahan Kampung Bugis

No.	Kriteria/Indikator	%	Parameter
1.	Keteraturan bangunan	41%	Bangunan tidak memiliki keteraturan
	Kepadatan bangunan		Kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah (17,9 unit/ha)
	Kelayakan fisik Bangunan	25%	Ketidakesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
2.	Aksesibilitas bangunan	33%	Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai
		29%	Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk
3.	Pelayanan air minum/baku	14%	Ketersediaan akses aman air minum yang belum terlayani
		100%	Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari (mandi, minum, cuci)
4.	Drainase lingkungan	8%	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
		19%	Ketidakterediaan drainase
		5%	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan
		11%	Tidak terpeliharanya drainase
		2%	Kualitas konstruksi drainase yang belum sesuai standar teknis
5.	Pengelolaan air limbah	59%	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		59%	Sapras pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6.	Pengelolaan persampahan	93%	Sapras persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		31%	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		93%	Tidak terpeliharanya sapras pengelolaan persampahan
7.	Pengamanan bahaya kebakaran	61%	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
		99%	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: KOTAKU Kota Tanjungpinang, 2018

Berdasarkan indikator-indikator pada tabel tersebut, Kampung Bugis ditetapkan sebagai Kelurahan yang menerima Program Kota Tanpa Kumuh didasarkan pada SK permukiman kumuh yang telah dikeluarkan oleh Walikota pada tahun 2014 dan indikator-indikator kumuh di Kampung Bugis yang dikeluarkan oleh KOTAKU Kota Tanjungpinang tahun 2018 seperti keteraturan bangunan, pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan lain-lain. Jika dilihat dari permasalahan pengelolaan sampah 93% sarana prasarana yang ada di Kampung Bugis tidak sesuai dengan standar teknis dan 93% tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Program Kota Tanpa Kumuh bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun maksud yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah berkaitan dengan perbaikan akses sarana dan prasarana infrastruktur serta perbaikan fasilitas pelayanan umum, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah.

Dalam petunjuk pelaksanaan program Kotaku masyarakat mempunyai peran dan tanggungjawab seperti, menyelenggarakan penanganan kumuh di kawasan permukiman kumuh, melaksanakan pembangunan yang bersifat komprehensif di segala bidang (tridaya), bertanggung jawab melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dan sistem yang sudah dibangun dibantu

dengan tim fasilitator untuk melakukan integrasi perencanaan di tingkat masyarakat dengan tingkat kabupaten/kota.

Menurut Stephens dalam Adon Nasrullah (1998),

"partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan atas: (1) partisipasi pada tahap perencanaan, (2) partisipasi pada tahap proses pelaksanaan, (3) partisipasi pada tahap pemanfaatan, dan (4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan."

Pada dasarnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keberhasilan suatu program karena masyarakat bukan hanya sebagai sasaran dalam suatu program, namun juga sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam program pembangunan tersebut.

Menurut SK Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang, Kampung Bugis sendiri merupakan titik yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Dengan ditetapkannya Kelurahan Kampung Bugis sebagai lokasi program Kota Tanpa Kumuh seperti membawa kabar baik bagi masyarakat Kampung Bugis. Masyarakat pun merasa pemerintah memperhatikan mereka dengan harapan program ini akan menyelesaikan masalah kekumuhan yang ada di Kelurahan Kampung Bugis, serta hal ini dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan Kampung Bugis kepada masyarakat luar.

Dengan adanya fasilitas yang dibangun menimbulkan dampak-dampak bagi masyarakat di Kampung Bugis. Adapun dampak bagi masyarakat dari segi sosial dan ekonomi. Pertama, adanya bak sampah keliling yang bertugas mengangkut

sampah dari rumah-rumah warga Kampung Bugis. Kedua, adanya peningkatan kepercayaan diri dari masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni dari Program Kotaku ini. Ketiga, adanya peningkatan perekonomian masyarakat setempat karena pembangunan fasilitas yang ada di Kampung Bugis melibatkan warga sekitar. Keempat, pengecatan rumah-rumah warga dan pembangunan jembatan lingkar membuat daya tarik tersendiri untuk Kampung Bugis sehingga masyarakat luar tertarik untuk datang ke Kampung Bugis.

Menurut hasil dari observasi awal peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat masih enggan untuk membuang sampah di tempat sampah. Tak dapat dipungkiri masih ada saja yang membuang sampah di laut walaupun sudah ada himbauan dan undang-undang yang mengatur. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 48 Poin d, i, dan k.

- Poin d berbunyi "membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis";
- Poin i berbunyi "membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan";
- Poin k berbunyi "mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan".

Yang dimana terdapat sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berbentuk plang himbauan yang tersebar di beberapa titik di Kampung Bugis. Sanksi sosial terhadap warga yang masih membuang sampah dilaut belum ada, jika ada warga yang membuang sampah dilaut itu hanya dibiarkan saja dengan alasan tidak ingin mencampuri urusan orang lain dan merasa tidak memiliki kewenangan untuk menegur. Menurut keterangan salah satu RT di Kampung Bugis, ketika melihat ada warganya yang membuang sampah dilaut akan mendapatkan teguran, tetapi hal tersebut tidak dapat dipantau secara berkala karena mungkin saja warga tersebut membuang sampah pada saat keadaan sepi atau pada malam hari.

Dari observasi awal peneliti juga menemukan bahwa bak sampah keliling yang biasanya mengangkut sampah dari rumah ke rumah setiap warga sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan ada masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar iuran untuk biaya operasional bak sampah keliling tersebut sebesar Rp.10.000,00 per bulannya.

Permasalahan sampah yang ada di Kampung Bugis yang dimana sampah tersebut bukan hanya berasal dari masyarakat itu sendiri tetapi juga terdapat sampah kiriman yang berasal dari luar Kampung Bugis. Dengan adanya sampah maka dapat menimbulkan kekumuhan yang dimana dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Kekumuhan indetik dengan kemiskinan yang dimana kemiskinan merupakan masalah sosial yang dapat menimbulkan permasalahan

lain seperti pengganggguran, tindak kriminal, tingkat pendidikan rendah dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kotaku, “Kota Tanpa Kumuh studi Masyarakat Kampung Bugis”.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana pola perilaku masyarakat Kampung Bugis setelah adanya program Kota Tanpa Kumuh?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah jawaban terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola perilaku masyarakat Kampung Bugis setelah adanya program Kota Tanpa Kumuh.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya dangan permasalahan penelitian yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan kebutuhan penelitian lanjutan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan peneliti mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai dampak program kota tanpa kumuh terhadap masyarakat.